

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham dan karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 dan 2011. Fokus dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan saham dan karakteristik dewan komisaris. Struktur kepemilikan saham terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah, sedangkan karakteristik dewan komisaris terdiri dari, komposisi komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keahlian dewan komisaris. Penelitian ini juga mengambil tiga variabel kontrol yaitu, *leverage*, *firm size*, dan profitabilitas.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam bab sebelumnya maka, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata pengungkapan sukarela pada perusahaan sampel di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 63%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel dalam pengungkapan informasi sukarela sudah mematuhi peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keungan (BAPEPAM) Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Dalam hal ini berarti, semakin besar kepemilikan manajerial tidak menjamin perusahaan akan mengungkapkan informasi sukarela, karena jumlah kepemilikan manajerial yang kecil mengakibatkan kepentingan manajerial belum bisa diselaraskan dengan kepentingan pemegang saham.
3. Kepemilikan *blockholder* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan *blockholder* tidak menjamin perusahaan akan mengungkapkan informasi sukarela. Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Dengan adanya kepemilikan terkonsentrasi maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak termotivasi untuk melakukan pengungkapan selain pengungkapan wajib.
4. Kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Dalam hal ini berarti, semakin besar kepemilikan pemerintah maka, perusahaan akan melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi, maka keberadaan perusahaan tersebut akan lebih disorot oleh *stakeholder*-nya termasuk pemerintah. Perhatian dan tekanan pemerintah akan membuat manajemen lebih transparan dalam pengungkapan informasi.

5. Komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Dengan kata lain, semakin banyak proporsi dewan komisaris independen tidak menjamin perusahaan akan mengungkapkan informasi sukarela yang lebih luas. Hal ini terjadi karena, dengan adanya konsentrasi kepemilikan pengangkatan dewan komisaris independen berdasarkan adanya hubungan istimewa (hubungan kekeluargaan, kenalan dekat maupun rasa penghargaan semata), maka independensi dewan komisaris akan berkurang sehingga pengawasan terhadap direksi tidak maksimal (termasuk pengawasan dalam pengungkapan sukarela).
6. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Dengan semakin banyak dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan direksi dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
7. Keahlian dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Penelitian ini tidak mampu memberikan bukti empiris adanya pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela. Dewan komisaris bekerja secara tim, setidaknya memiliki keahlian dibidang hukum, peraturan pasar modal dan dengan proses bisnis terkait. Maka keahlian dibidang akuntansi dan keuangan saja tidak cukup maksimal dalam melaksanakan mekanisme GCG.
8. Leverage, dan *Firm Size* mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela.



## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan keterbatasan di atas maka saran yang dapat disampaikan oleh peneli adalah:

1. Jumlah sampel yang relative terbatas yaitu 130 perusahaan pada tahun 2010 dan 2011 dari 437 perusahaan yang terdaftar di BEI, karena terdapat kesulitan dalam pengambilan data laporan tahunan yang diterbitkan dalam dua tahun berturut turut. Pengambilan sampel diharapkan dapat lebih banyak, sehingga didapatkan hasil yang berbeda, maka semua variabel yang terkait dapat berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.
2. Penelitian ini menggunakan kepemilikan tertinggi untuk kepemilikan saham oleh pihak *blockholder*, yang tidak memisahkan antara kepemilikan individual maupun institusional. Kemungkinan ada pengaruh berbeda dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan sukarela perusahaan sampel. Pemisahan antara kepemilikan individual dan institusioanal dalam kepemilikan *blockholder*, karena kemungkinan terdapat respon berbeda antara individual dan institusional dalam melakukan pengawasam terhadap kinerja manajemen yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan sukarela.
3. Nilai  $R^2$  sangat kecil (0.125), hal ini berarti hanya 12,5% variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil variabel lain utuk dapat meningkatkan nilai  $R^2$ .

Misalnya kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis kelamin dewan komisaris dan pendidikan dewan komisaris.

4. Dalam penelitian ini menunjukkan integritas dewan komisaris independen, yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, hal ini terjadi karena pemilihan dewan komisaris independen berdasarkan rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat. Disarankan untuk pemilihan dewan komisaris independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan selektif, yang selanjutnya dapat membawa perusahaan dalam kondisi yang lebih baik dengan peran dewan komisaris yang berjalan sebagaimana mestinya.
5. Peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang penegakan prinsip GCG memang sudah banyak (termasuk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995). Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis *two board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa (model Continental Europe). Hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota dewan direksi dan dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka kedudukan dewan komisaris dan direksi berada diposisi yang sama (sejajar). Bila ditinjau dari perspektif *good governance*, kedudukan yang sejajar ini dapat mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengendalian (*control*) berjalan kurang efektif karena bisa saja dewan komisaris dianggap oleh dewan direksi sebagai

partner kerja, bukan sebagai pengawas kerja dewan direksi. Hal ini bisa menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan *GCG* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah perlu ditinjau kembali Undang-undang Perseroan Terbatas, khususnya tentang pengaturan kembali adanya kedudukan yang sejajar antara dewan komisaris dan dewan direksi.

6. Akuntan yang menjalankan profesinya sebagai auditor memiliki peran penting yang bertugas memeriksa kewajaran atas laporan keuangan, auditor memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Dengan melihat peran akuntan yang begitu penting maka diharapkan para akuntan memegang teguh prinsip-prinsip *GCG* (kewajaran/fairness, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan independensi).